



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA LHOKEUMAWE



# RAKOR FORUM SATU DATA INDONESIA

*"Kemiskinan Ekstrem"*

Lhokseumawe, 27 Maret 2024

Oriza Santifa  
BPS Kota Lhokseumawe



# Satu Data Indonesia (SDI)

---



# Mengapa Satu Data Indonesia



- 1. Data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten**
  - Data jumlah kapal penangkap ikan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perikanan
- 2. Data pemerintah sulit diakses oleh instansi pemerintah lain dan oleh publik**
  - Banyak data yang dipegang oleh individu
  - Diperlukan hubungan personal untuk mengakses data
  - Format data yang dibagipakaikan tidak terbuka dan sulit diolah (JPG,PDF)

## **Produsen Data**

unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk **menghasilkan data**

## **Walidata**

unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang bertugas **mengumpulkan dan mengelola data** yang dihasilkan oleh produsen data serta **menyebarkan data** di lingkup instansi pemerintah

## **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

pejabat yang bertanggung jawab di bidang **penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan** informasi kepada publik



## **Pembina Data**

Instansi Pusat yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan **pembinaan terkait Data kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.**



## **Pengguna Data**

Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang **menggunakan data**



## **Portal Satu Data**

Media **bagi pakai data di tingkat nasional** yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

## 1. Dewan Pengarah Satu Data

- Dewan Pengarah bertugas melakukan koordinasi kebijakan SDI dan pelaksanaan SDI pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
  - Dewan Pengarah dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya.
- 

## 2. Forum Satu Data

### Forum Satu Data mempunyai tugas:

- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- Menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya menjadi Data Prioritas;
- Menyepakati dan memantau pencapaian Rencana Aksi Tahunan Satu Data Indonesia;
- Menyepakati referensi data dan data induk serta K/L yang bertindak sebagai produsen data untuk data tersebut;
- Menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

### Forum Satu Data Daerah mempunyai tugas:

- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data daerah;
- Menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data daerah.

**Forum Satu Data Daerah terdiri dari Pembina Data daerah, Walidata daerah serta Walidata pendukung.**

### Forum Satu Data di tingkat pemerintah pusat

- beranggotakan:
  - Pejabat tinggi madya dari Instansi Pusat anggota Dewan Pengarah;
  - Walidata perwakilan dari K/L;
  - Pembina Data;

## 3. Walidata

### Walidata bertugas:

- Memberikan masukan kepada Pembina Data dan menteri/kepala lembaga mengenai Standar Data dan Metadata;
- Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan prinsip SDI;
- Menyebarkan Data dan Metadata serta Kode Referensi dan Data Induk di Portal Satu Data;
- Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
- Berpartisipasi aktif dalam Forum Satu Data.

Setiap Instansi Pemerintah hanya memiliki **satu unit** yang menjalankan tugas Walidata, sesuai penunjukan Kepala Instansi Pemerintah.

Walidata dapat dibantu oleh **Walidata Pendukung dalam unit Produsen Data**, sesuai penunjukan Kepala Instansi Pemerintah.

## 4. Pembina Data

### Pembina Data bertugas:

- Menetapkan **Standar Data** dan **Metadata** yang berlaku lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
- Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
- Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas;
- Melakukan pembinaan Satu Data Indonesia.

### Pembina Data Daerah bertugas:

- Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data
- Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas;
- Melakukan pembinaan Satu Data daerah.

## 5. Sekretariat Satu Data

### **Sekretariat Satu Data bertugas:**

- Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah Satu Data dan Forum Satu Data; dan
- Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

---

## 6. Produsen Data

### **Produsen Data bertugas:**

- Memberikan masukan kepada Pembina Data dan Kepala Instansi Pemerintah terkait Standar Data dan Metadata Baku;
- Menghasilkan Data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
- Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.



# Forum Data di Indonesia

---



# 1 Perencanaan pembangunan daerah

Memerlukan **data berkualitas**

# 2 Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan

Membutuhkan data dan informasi pembangunan sampai dengan **wilayah terkecil** secara **komprehensif** dan **terpadu**

## Latar Belakang

**Melalui survei-survei** yang dilakukan oleh **pemerintah daerah**, apabila data statistik dasar dari BPS tidak/belum dapat menjawab masalah pembangunan daerah

- ✓ Data tersebar di instansi sektoral
- ✓ Kualitas data belum terjamin
- ✓ Perubahan alur data sektoral sejak berlakunya otonomi daerah
- ✓ Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan data sektoral

# 3 Diperlukan Data Sektoral

# 4 Masih terdapat permasalahan dalam penyediaan data

# Tujuan Forum Data

## 1 Wadah Komunikasi

sebagai bentuk koordinasi penyelenggara kegiatan statistik

- Identifikasi dan analisis kebutuhan data
- Koordinasi penyediaan data
- Penyamaan persepsi tentang interpretasi data
- Peningkatan komitmen sektor dalam penyediaan data berkualitas dan tepat waktu

## 2 Data dan Informasi

Tersedianya data dan informasi yang berkualitas, komprehensif, dan terpadu sampai dengan tingkat wilayah terkecil

## 3 Kebutuhan dan Ketersediaan Data

Tidak terjadi kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia

## 4 Pemanfaatan Data

Mendorong pemerintahan daerah dalam memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik

Terjadinya **koordinasi dan komunikasi antar sektor** dalam penyediaan dan pemanfaatan data **1**

Terciptanya **jembatan antara penyedia dengan pengguna data** untuk mendiskusikan substansi, metodologi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi atau SKPD **2**

Tersedianya **media diseminasi data dan informasi** yang disiapkan oleh masing-masing SKPD dan instansi vertikal **3**

## Manfaat Forum Data

Meningkatnya **komitmen sektor** dalam penyediaan data berkualitas yang tepat waktu **4**

Tersedianya **media untuk advokasi kepada pengambil kebijakan** untuk pemanfaatan data berkualitas bagi perencanaan pembangunan **5**

Tersedianya **forum yang memberikan rekomendasi kegiatan** untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan melalui *capacity building*. **6**

# Karakteristik

Dibentuk berdasarkan **SK Gubernur/Bupati**

Merupakan **wadah komunikasi data dan informasi** pembangunan daerah lintas sektor

**Dibiayai oleh APBD** serta *cost sharing* dari berbagai SKPD dan instansi vertikal.

**Forum penyedia data dan informasi** untuk perencanaan pembangunan di provinsi/kabupaten

**Jejaring antar SKPD** dalam penyediaan data dan informasi untuk penyempurnaan implementasi kebijakan otonomi daerah

Anggota **seluruh SKPD dan instansi vertikal** di provinsi/kabupaten

Kelembagaan dan keanggotaan forum **bersifat permanen**

# Ruang Lingkup

# Kelembagaan dan Keanggotaan Forum Data

Kelembagaan Forum Data **dikukuhkan dengan SK Gubernur/Bupati**, bersifat formal dan resmi

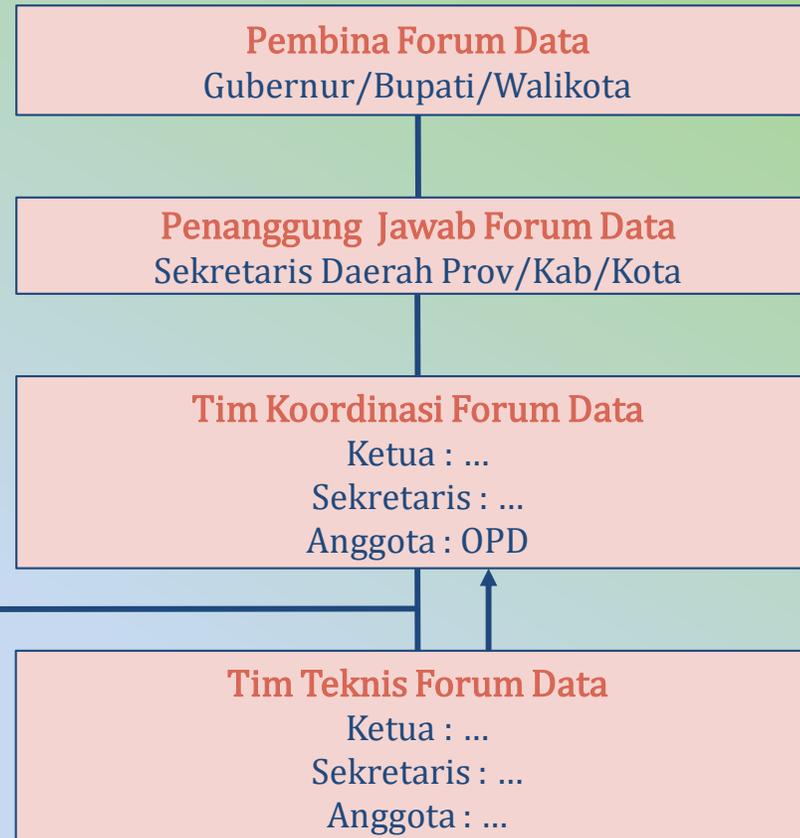
**Sekretariat Forum Data**, dengan struktur (Tim Koordinasi dan Tim Teknis)

Pembina Forum Data adalah **Gubernur/Bupati**

**Kedudukan Forum Data** di bawah Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

## Struktur Kelembagaan Forum Data Provinsi/Kab/Kota ....

Keterangan :



# Pengelolaan Kegiatan Forum Data

1

## Perencanaan

Identifikasi kesenjangan data, menetapkan prioritas, membuat *workplan*, serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Forum Data

2

## Pelaksanaan

Koordinasi, advokasi dan fasilitasi pengembangan Forum Data, dan pemantauan/evaluasi dalam pengelolaan Forum Data

3

## Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

4

## Pembiayaan

APBD, APBN, dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan *cost sharing* dari berbagai pemangku kepentingan

# KEMISKINAN EKSTREM



# Kemiskinan Makro VS Mikro (Basis Data Terpadu)

KEMISKINAN MAKRO (sejak tahun 1976)	KEMISKINAN MIKRO (Basis Data Terpadu, REGSOSEK) (Tahun 2005, 2008, 2011, 2015, 2018, 2022)
<p>1. <b>Metodologi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konsep: <i>Basic Needs Approach</i></li> <li>▪ Pendekatan: Moneter</li> <li>▪ Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per kapita perhari) + Non Makanan</li> </ul>	<p>1. <b>Metodologi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konsep: Multi Dimensi</li> <li>▪ Pendekatan Non-Moneter</li> <li>▪ Didasarkan pada Indeks atau PMT dari ciri-ciri RT miskin</li> </ul>
<p>2. <b>Sumber data:</b> Susenas Konsumsi pengeluaran (Maret dan September)</p>	<p>2. <b>Sumber data:</b> PSE05, PPLS08, PPLS2011, PBBDT2015, DTKS, "Regsosek"</p>
<p>3. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan <u>ESTIMASI</u></p>	<p>3. Data menunjukkan jumlah RT Sasaran (<b>sangat miskin + miskin + hampir/ rentan miskin</b>) - <i>by name by address</i></p>
<p>4. <b>Pemanfaatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berguna untuk <b>perencanaan</b> dan <b>evaluasi</b> program kemiskinan dengan target geografis, tapi tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin.</li> </ul>	<p>4. <b>Pemanfaatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berguna untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Rastra, BPJS, dsb)</li> </ul>

# BAGAIMANA BPS MENGUKUR KEMISKINAN?? (MAKRO)

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan **konsep kebutuhan dasar (basic needs approach)**, Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut **garis kemiskinan (makanan & bukan makanan)**



**Garis kemiskinan makanan** adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari),



**Garis kemiskinan bukan makanan** adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya,



**Penduduk miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan,



Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil penghitungan **konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple)**,

**Indikator  
Kemiskinan  
Makro**



**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**



**Indeks Kedalaman Kemiskinan**



**Indeks Keparahan Kemiskinan**

# Indikator Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Tahun 2018-2023



Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	23,88	23,05	22,69	23,38	23,03	23,10
Persentase penduduk miskin (P0)	11,81	11,18	10,80	11,16	10,84	10,73
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,72	1,51	1,56	1,87	1,33	2,23
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,39	0,30	0,29	0,54	0,26	0,70
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	367.525	376.832	401.158	427.045	460.583	498.431

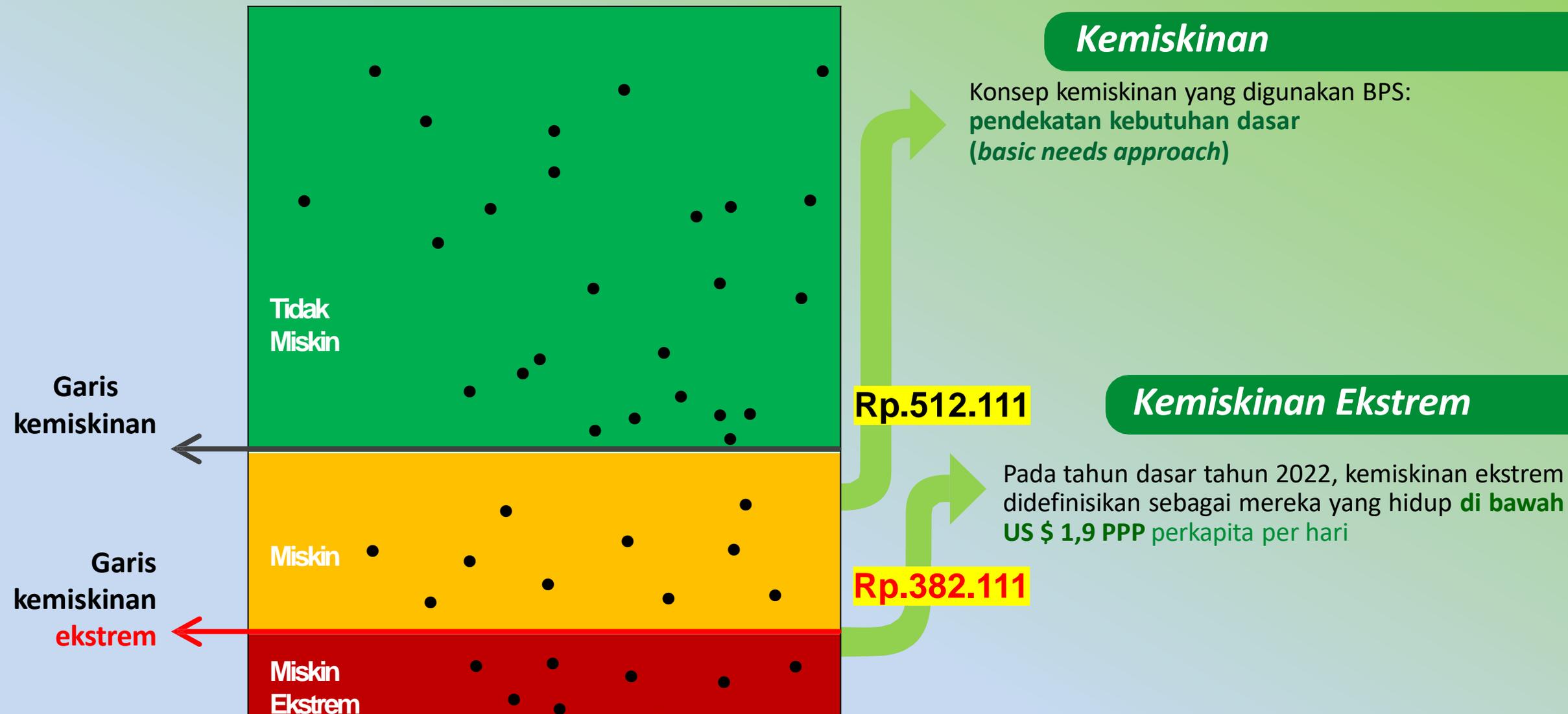
# Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Tahun 2023



Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (PO) menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
SIMEULUE	18,98	18,37	17,92
ACEH SINGKIL	20,36	19,18	19,15
ACEH SELATAN	13,18	12,43	12,10
ACEH TENGGARA	13,41	12,83	12,45
ACEH TIMUR	14,45	13,91	13,39
ACEH TENGAH	15,26	14,50	14,38
ACEH BARAT	18,81	17,93	17,86
ACEH BESAR	14,05	13,38	13,38
PIDIE	19,59	18,79	18,78
BIREUEN	13,25	12,51	12,12
ACEH UTARA	17,43	16,86	16,64
ACEH BARAT DAYA	16,34	15,44	15,43
GAYO LUES	19,64	18,87	18,82
ACEH TAMIANG	13,34	12,61	12,51
NAGAN RAYA	18,23	17,38	17,25
ACEH JAYA	13,23	12,51	12,42
BENER MERIAH	19,16	18,39	18,31
PIDIE JAYA	19,55	18,45	18,40
BANDA ACEH	7,61	7,13	7,04
SABANG	15,32	14,66	14,59
LANGSA	10,96	10,62	10,53
LHOKSEUMAWE	11,16	10,84	10,73
SUBULUSSALAM	17,65	16,94	16,41
PROVINSI ACEH	15,33	14,64	14,45
-			



# Konsep Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem



# Estimasi Kemiskinan Ekstrem 2023

**Tabel Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem**

**Provinsi Aceh 2021-2023**

No	Kode	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu Jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
			2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
<b>1</b>	<b>11.00</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>188.77</b>	<b>162.81</b>	<b>102.19</b>	<b>3.47</b>	<b>2.95</b>	<b>1.83</b>
2	1101	Simeulue	1.69	3.70	2.95	1.76	3.80	3.00
3	1102	Aceh Singkil	7.26	4.46	2.98	5.80	3.52	2.32
4	1103	Aceh Selatan	4.93	2.33	2.20	2.02	0.94	0.88
5	1104	Aceh Tenggara	9.23	4.39	2.23	4.22	1.98	0.99
6	1105	Aceh Timur	15.11	12.76	12.24	3.43	2.86	2.70
7	1106	Aceh Tengah	10.74	10.20	4.81	5.01	4.69	2.19
8	1107	Aceh Barat	12.81	4.54	1.94	6.05	2.12	0.89
9	1108	Aceh Besar	11.79	11.95	5.95	2.75	2.75	1.35
10	1109	Pidie	19.71	22.15	20.77	4.36	4.85	4.49
11	1110	Bireuen	8.20	11.89	3.35	1.72	2.47	0.68
12	1111	Aceh Utara	16.62	18.65	3.35	2.65	2.94	0.52
13	1112	Aceh Barat Daya	6.08	1.92	5.05	3.96	1.24	3.21
14	1113	Gayo Lues	1.55	4.01	3.70	1.63	4.18	3.82
15	1114	Aceh Tamiang	5.23	6.23	2.40	1.74	2.05	0.78
16	1115	Nagan Raya	9.07	6.19	5.57	5.39	3.63	3.23
17	1116	Aceh Jaya	2.62	1.37	1.30	2.75	1.41	1.32
18	1117	Bener Meriah	15.22	10.57	2.56	10.16	6.96	1.67
19	1118	Pidie Jaya	11.80	7.21	3.69	7.26	4.37	2.21
20	1171	Kota Banda Aceh	4.72	5.98	2.52	1.71	2.14	0.89
21	1172	Kota Sabang	1.88	2.09	1.88	5.42	5.97	5.32
22	1173	Kota Langsa	3.40	6.32	2.67	1.89	3.46	1.44
23	1174	Kota Lhokseumawe	6.76	2.25	6.99	3.23	1.06	3.25
24	1175	Kota Subulussalam	2.38	1.68	1.09	2.90	2.03	1.29

**Keterangan**

\* : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

\*\* : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE



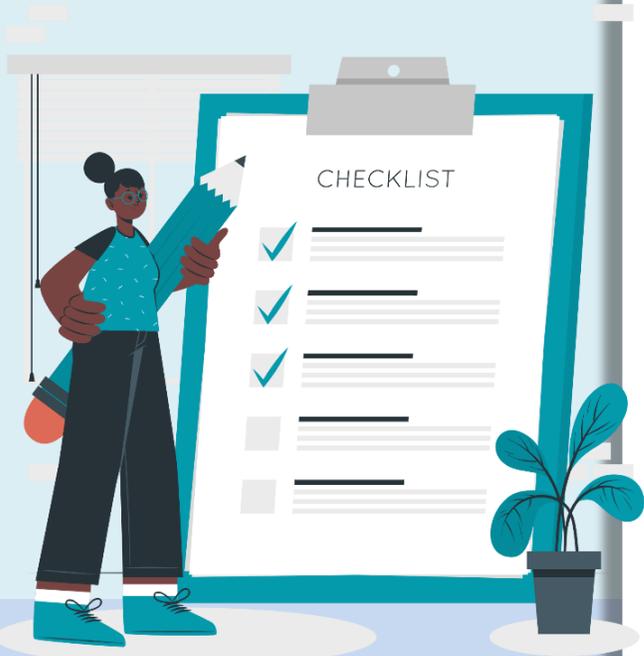
Data **Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)** adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia DAN udah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil)..



**Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)** adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

3. Alternatif penciri miskin ekstrem antara lain:
  - a. Keluarga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH);
  - b. Bahan bangunan utama atap rumah terluas seng, asbes, bambu, kayu/sirap, atau jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia;
  - c. Bahan bangunan utama dinding rumah terluas kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, atau bambu;
  - d. Bahan bangunan utama lantai rumah terluas semen/bata merah, bambu, atau tanah;
  - e. Bahan bakar memasak utama elpiji 3 kg/minyak tanah/kayu bakar;
  - f. Sumber penerangan rumah tangga listrik meteran 450 watt;
  - g. Sumber air minum utama sumur terlindung/tak terlindung, mata air terlindung/tak terlindung, air sungai/danau/waduk/kolam/irigasi, atau air hujan
  - h. Luas lantai perkapita  $\leq 10 \text{ m}^2$ ;
  - i. Tidak memiliki beberapa aset, antara lain: *Air Conditioner*, pemanas air (*water heater*) di kamar mandi (keran air panas/air dingin), telepon rumah, TV layar datar/TV LED, emas/perhiasan (minimal 10 gram), komputer/laptop/tablet, mobil, dan atau kapal/perahu motor.

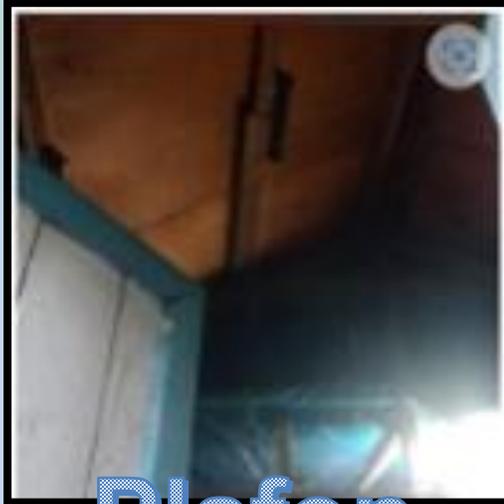
# Kriteria Miskin Ekstrem Provinsi Aceh



1. **Kepemilikan rumah:** Milik Sendiri, kontrak, bebas sewa dan Lainnya.
2. **Jenis lantai terluas:** Semen/bata merah
3. **Jenis dinding terluas:** Kayu/papan
4. **Jenis atap terluas:** Seng
5. **Sumber air minum utama:** Sumur air terlindung
6. **Daya listrik:** Listrik meteran 450 watt
7. **Bahan bakar untuk memasak:** gas LPG 3 kg
8. **Fasilitas BAB:** Ada, digunakan hanya ART sendiri
9. **Kepemilikan aset:** Sepeda motor dan tanah/lahan
10. **Umur Kepala Keluarga:** Laki-laki 47; Perempuan 52
11. **Pendidikan Kepala Keluarga:** SD

**MISKIN EKSTREM → Memenuhi 9 Kriteria atau Lebih**

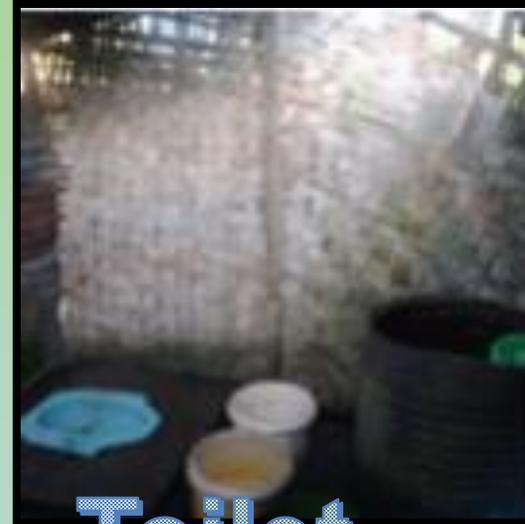
# Potret Miskin Ekstrem



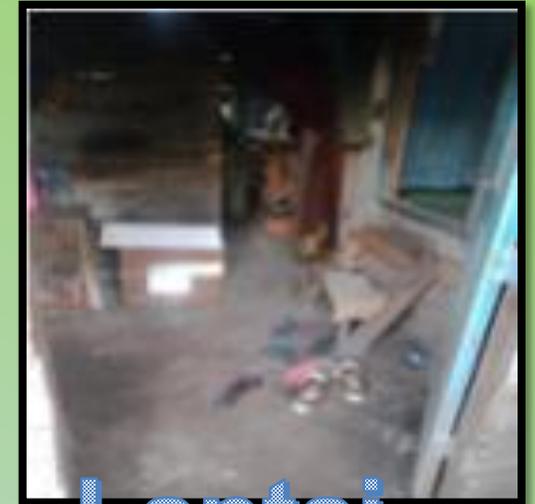
Plafon



Tampak  
Depan



Toilet



Lantai



# Kerangka Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan



Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal



Menurunkan Beban Pengeluaran



Program Keluarga Harapan



Akses Pangan: Rastra/BPNT



Akses Pendidikan: Indonesia Pintar



Akses Kesehatan: Indonesia Sehat



Akses Penerangan:  
Subsidi Listrik Tepat Sasaran



Meningkatkan Pendapatan



Akses Pembiayaan: KUR



Pendampingan Usaha Sektor: KUBE



Pengembangan Ekonomi Lokal:  
DanaDesa

Upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan Kemiskinan:  
(1) Ketepatan sasaran, dan (2) Mekanisme program dan kualitas implementasi

# RANGKUMAN



- 1** Kemiskinan (ekstrem), **persoalan multidimensi, akses kebutuhan dasar**: pendidikan rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah
- 2** Kemiskinan (ekstrem) bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran data perlu dilakukan secara rutin, terintegrasi, dan berkesinambungan
- 3** Perlu standardisasi mengenai siapa si miskin, sehingga penentuan target pensasarannya tidak berbeda antar K/L/D/I
- 4** Intervensi level Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan perubahan kesejahteraan keluarga dari data Regsosek atau P3KE setelah dilakukan pemadanan dan pemutakhiran



*Better Data, Better Lives* KOTA LHOKEUMAWE



# Terima Kasih



[bps1174@bps.go.id](mailto:bps1174@bps.go.id)



[bpskotalhokseumawe](https://www.instagram.com/bpskotalhokseumawe)



[lhokseumawekota.bps.go.id](http://lhokseumawekota.bps.go.id)